

**PENGATURAN HUKUM PERKAWINAN SESAMA JENIS DI  
INDONESIA DAN BELANDA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI  
MANUSIA**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Ryszard Ken Sakti**

**NIM. 05030720027**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Publik Islam**

**Program Studi Hukum**

**Surabaya**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ryszard Ken Sakti

NIM : 05030720027

Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum

Judul : Perkawinan Sesama Jenis dalam Perspektif HAM (Studi Perbandingan Hukum tentang Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Belanda dan Arab)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 30 Agustus 2023

Saya yang menyatakan,

  
Ryszard Ken Sakti

NIM. 05030720027

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ryszard Ken Sakti  
NIM. : 05030720027  
Judul : Perkawinan Sesama Jenis dalam Perspektif HAM  
(Studi Perbandingan Hukum tentang Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Belanda, dan Arab)

ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 30 November 2023

Pembimbing,



**Dr. Riza Multazam Luthfy, M.H.**

NIP. 198611092019031008

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

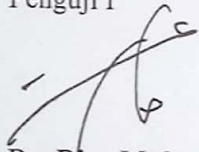
Nama : Ryszard Ken Sakti

NIM. : 05030720027

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

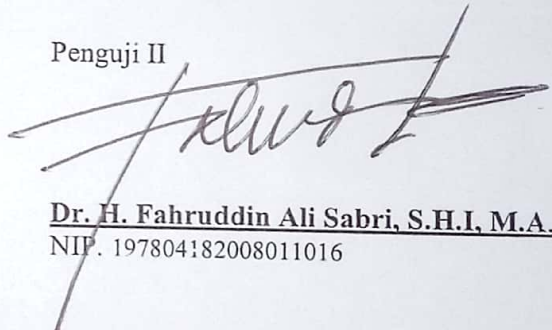
Penguji I



Dr. Riza Multazam Luthfy, M.H.

NIP. 198611092019031008

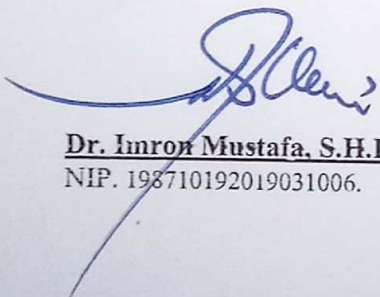
Penguji II



Dr. H. Fahrudin Ali Sabri, S.H.I, M.A.

NIP. 197804182008011016

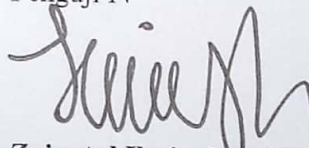
Penguji III



Dr. Imron Mustafa, S.H.I., M.Ud.

NIP. 198710192019031006.

Penguji IV



Zainatul Ilmiah, M.H.

NIP. 199302152020122020.

Surabaya, 21 Desember 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Sugianto Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 1971999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ryszard Ken Sakti  
NIM : 05030720027  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam  
E-mail address : 05030720027@student.uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

Pengaturan Hukum Perkawinan Sesama Jenis di Indonesia dan Belanda dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Januari 2024

Penulis



( Ryszard Ken Sakti )

## ABSTRAK

Fungsi Hak Asasi Manusia dalam penerapan pengaturan hukum perkawinan dalam studi kasus perkawinan sesama jenis di Negara Indonesia dan Belanda patut dikupas. Karena, terdapat persoalan terhadap perbedaan penerapan Hak Asasi Manusia dalam pengaturan hukum perkawinan sesama jenis. Skripsi ini menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam rumusan masalah dari penelitian untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum tentang Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan Belanda. Melihat perspektif Hak Asasi Manusia apa yang diterapkan di masing-masing Negara mengenai peraturan perkawinan terdapat dalam unsur dan kaidah pasal.

Data penelitian ini menggunakan metode yang dirasa sesuai dengan permasalahan tersebut yaitu dengan menggunakan jenis penelitian hukum *normative* yuridis, dengan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Penulis menggunakan beberapa bahan hukum diantaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan itu yang diatur dalam peraturan Negara Indonesia. Lalu, di dalam peraturan Negara Belanda terdapat Buku 1 KUH Perdata *van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek* untuk memberi penjelasan tambahan penulis menggunakan bahan hukum sekunder seperti buku-buku, literatur, jurnal, dan *website* serta penggunaan bahan hukum tersebut diperoleh dengan cara pencarian melalui media internet.

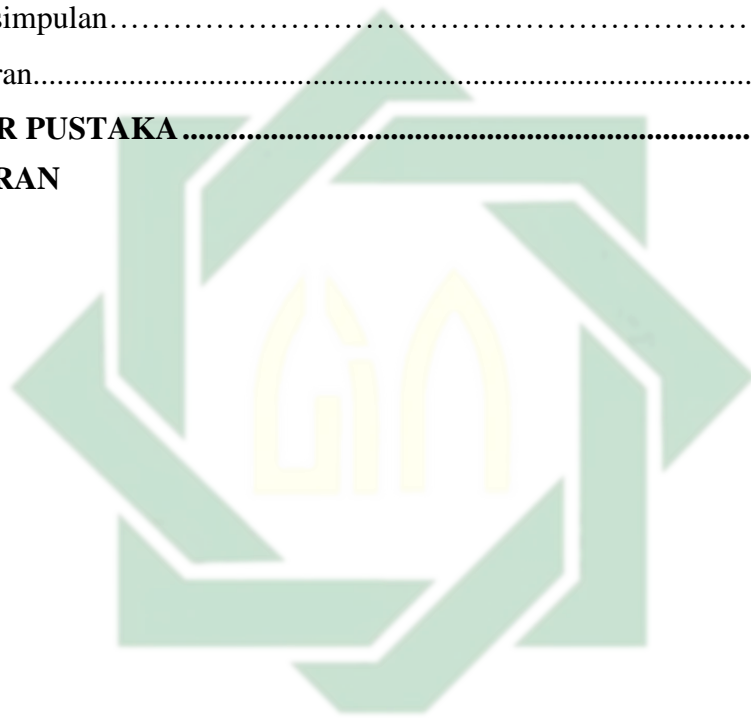
Hasil dari penelitian ini untuk mewujudkan: *Pertama*, mengetahui masing-masing negara memiliki peraturan yang secara khusus mengatur tentang perkawinan. *Kedua*, apakah ada hakikat norma Hak Asasi Manusia yang perlu dibela dalam studi kasus perkawinan sesama jenis. Kemudian hasil penelitian tersebut telah dilakukan maka analisisnya menggunakan interpretasi gramatikal dan sistematis agar dapat ditarik kesimpulan.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan: *Pertama*, lebih cermati dan pahami Undang-Undang perkawinan kedua Negara tersebut. Karena, ada perbedaan tetapi tujuan setiap Negara yaitu sama untuk melindungi hak setiap warga negaranya. Bahkan, sebaiknya dua Negara Indonesia dan Belanda perlu dijelaskan detailnya setiap Undang-Undang dan peraturan yang diaturnya. *Kedua*, khususnya untuk Negara Indonesia tidak hanya menuliskan "Cukup Jelas" di pasalnya.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A.Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Penelitian Terdahulu.....	11
G. Definisi Operasional.....	14
H. Metode Penelitian.....	17
I. Sistematika Pembahasan.....	19
<b>BAB II PERLINDUNGAN PERKAWINAN SESAMA JENIS DALAM HAK ASASI MANUSIA</b> .....	<b>22</b>
A. Pengertian Perkawinan Sesama Jenis.....	22
B.Teori-Teori Dalam Pengaturan Perkawinan Sesama Jenis Hak Asasi Manusia.....	26
C. Hak-Hak Terbatas <i>Non-Derogable Rights</i> .....	39
<b>BAB III TINJAUAN PENGATURAN PERKAWINAN SESAMA JENIS DI INDONESIA DAN BELANDA</b> .....	<b>45</b>
A. Tinjauan Pengaturan Hukum Perkawinan Sesama Jenis di Indonesia .....	45
B. Tinjauan Pengaturan Hukum Perkawinan Sesama Jenis di Belanda .....	49
1. Sejarah Pengaturan Hukum Perkawinan Sesama Jenis di Belanda .....	49
2. Pengaturan Hukum Perkawinan Sesama Jenis di Belanda.....	55

<b>BAB IV PENERAPAN HUKUM PERKAWINAN SESAMA JENIS DI INDONESIA DAN BELANDA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA.....</b>	<b>59</b>
A. Perbandingan Penerapan Pengaturan Hukum Perkawinan Sesama Jenis Di Indonesia Dan Belanda.....	59
B. Analisis Penerapan Teori Hak Asasi Manusia Di Negara Indonesia Dan Belanda.....	65
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



## DAFTAR TABEL

Table 1 Perbedaan Penerapan Teori Perkawinan Sesama Jenis Di Indonesia dan Belanda Dalam Perspektif HAM.....	67
--	----



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Buku 1 Kitab Undang-Undang Perdata Belanda (*van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek*).
- Donnelly, Jack. *Universal Human Rights in Theory and Practice*. Cornell University Press, Ithaca and London, 2003.
- Evans, Tony. *Introduction: Power, Hegemony, and the Universalization of Human Rights*, dalam *Human Rights Fifty Years On: A Reappraisal*. Ingris: Manchester University Press, 1998.
- Gardbaum, S. *Proportionality & Democratic Constitutionalism*. Sebagaimana dikutip oleh Huscroft, G., Miller, B., & Webber, G. ((Eds.). *Proportionality & the Rule of Law: Rights, justification, reasoning*. Cambridge University Pres. UCLA School of Law Research, 2014.
- Ketut, I Suardita. *Pengalaman Bahan Hukum (PBH)*. Bali: Simdos Unud Press, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- P, Firliana. *The 'O' Project*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2010.
- Seidl, Jennifer, and McMordie. *The Concise Oxford Dictionary*. Oxford University Press 1987.
- Smith, Rhona K. M. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2007.
- Umar, Marzuki Sa'abah. *Seks dan Kita*. Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Warna, Windy Irawan. *Negara dan Hak Asasi Kelompok Minoritas LGBTIQ*. Jakarta: FIB UI, 2010.
- Wartiningsih, Yulianti Rina, Indien, and Winarwati. *Buku Ajar: Perbandingan Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.

## JURNAL

- Ega, Ahmad Putra Dani, Murry Darmoko. "Ketentuan Perkawinan Sesama Jenis Di Indonesia Dan Belanda." *Judiciary: Jurnal Hukum dan Keadilan* 12, no. 1 (2023): accessed Desember 31, 2023 <https://jurnal.fhubhara.com/index.php/judiciary/article/download/150/164>.
- Asyari, Fatimah. "LGBT dan Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Legalitas* 2, no. 2 (Desember 2017), accessed January 5, 2024, <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/LG/article/view/3385>.
- Khafi, Ahmad Ghon. "Tantangan Representasi Self Appointed Kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender/Transeksual Dan Interseks (LGBTI) Sebagai Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) Periode 2012-2017." *Universitas Indonesia Library*, accessed January 9, 2024, <https://lib.ui.ac.id>.
- BPK. "Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan," BPK.go.id (2018): 1–10, <https://sultra.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Sinkronisasi-Harmonisasi.pdf>.
- Candra, Galuh Purnamasari. "Problematika Penarapan Aturan Pembatasan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia." Makalah disampaikan dalam Seminar Internasional Developing Legal System to Promote Sosial Welfare, Jakarta, 23-24 Agustus 2017.
- Prayudi, Rian Saputra. "Perbandingan Hukum Pidana Indonesia Dengan Inggris." *Jurnal Pahlawan* 3, no. 1 (2020).
- Ratno Lukito. "Compare But Not to Compare': Kajian Perbandingan Hukum Di Indonesia." *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (December 30, 2022): 9. accessed January 9, 2024 <https://www.ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/727>.
- Rohmawati. "Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender/Transeksual (LGBT) Perspektif Hukum Islam." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (2016): 6. accessed 5 January, 2024 <https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/ahkam/article/view/318>.
- Widiatmaka, Pipit. "Pembangunan Karakter Nasionalisme Peserta Didik Di Sekolah Berbasis Agama Islam." *JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan* 1, no. 1 (2016) <http://journal.umpo.ac.id/index.php/JPK/article/view/301>.

### **ARTIKEL INTERNET**

Soebagio, Rita. "LGBT dan RUKKG." last modified March 30, 2021, accessed January 8, 2024, <http://www.republika.co.id/berita/koran/islamia/14/09/18/nc2z89-lgbt-dan-ruu-kkg>.

Zilver, Karen. "Nederland telt 20.000 homo-echtparen; vrouwenkoppels scheiden vaker." Trouw, last modified March 30, 2021, accessed January 8, 2024, <https://www.trouw.nl/binnenland/nederland-telt-20-000-homo-echtparen-vrouwenkoppels-scheiden-vaker~b5f66aaf/>.

### **SKRIPSI, TESIS, DISERTASI**

Mangaranap, Timbo Sirait. "Menilik Akseptabilitas Perkawinan Sesama Jenis Dalam Konstitusi Indonesia" (Program Doktor Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan Bandung, 2017).

### **UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Umur Perkawinan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Permenag Nomor 19 tentang Pencatatan Perkawinan Tahun 2018

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin

Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2011

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A